

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKIP)**



**DINAS KEBAKARAN  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2020, Keberadaan LKIP Dinas Kebakaran ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistim Akuntabilitas yang memadai.

Lebih jauh LKIP Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi ini diharapkan sebagai pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dimasa mendatang, sangat diharapkan masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi.

Semoga LKIP Dinas Kebakaran ini membawa manfaat positif bagi jajaran aparat Dinas Kebakaran khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Bukittinggi, Januari 2021



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP), Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi organisasi sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2016-2021, dengan Visi “ **Mewujudkan Bukittinggi Kota Siaga dan Aman Terhadap Bahaya Kebakaran dan Bencana**” dengan misi meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran serta peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemadam Kebakaran.

Analisa akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap misi tersebut yang meliputi tujuan dan dijabarkan dalam sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran, dengan didukung oleh 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Capaian indikator kinerja sasaran pada Dinas Kebakaran tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu meningkatkan upaya pencegahan kebakaran dan Meningkatnya kualitas penanggulangan kebakaran dengan capaian kedua indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori sangat baik.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas kebakaran Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp6.319.212.733,- dengan realisasi sebesar Rp5.757.209.888,- atau 91,11%.

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
 BAB I PENDAHULUAN .....	1
1 Latar belakang .....	1
2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	1
3 Isu Strategis .....	4
4 Landasan Hukum .....	4
5 Sistematika Penulisan .....	5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	6
1 Perencanaa Strategis .....	6
2 Perjanjian Kinerja .....	14
3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
1 Indikator Kinerja .....	18
2 Metodologi Pengukuran Kinerja .....	19
3 Analisa Pencapaian Kinerja .....	20
4 Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	20
5 Kendala yang Dihadapi .....	24
6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	25
7 Akuntabilitas Keuangan .....	26
 BAB IV PENUTUP .....	39
1 Kesimpulan .....	39
2 Strategi Pemecahan Masalah .....	40

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

		<b>HAL</b>
Tabel II.1.C	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016-20121	10
Tabel II.1.D	Tujuan, Sasaran , Kebijakan dan Program Kegiatan Dinas Kebakaran tahun 2020	12
Tabel II.2.a	Perjanjian Kinerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2020	14
Tabel II.2.b	Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2020	15
Tabel II. 3	Penetapan Kinerja Tahun 2020 Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi	16
Tabel III. 4.a	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2020	21
Tabel III. 4.b	Perbandinagn Capaian Kinerja Sasaran strategis Penyerapan Anggaran pada setiap sasaran Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2020	23
Tabel III. 4.c	Perbandinagn Capaian Kinerja Sasaran strategis (tiga) Tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019)	24
Tabel III.7.a	Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Kebakaran Tahun 2020	26
Tabel III 7.b	Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2020	36

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi disusun berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Dinas Kebakaran kota Bukittinggi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah no. 9 tahun 2016. Dinas kebakaran dengan Tipe C Berdasarkan peraturan Walikota Bukittinggi no 52 tahun 2016 Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

LKIP Dinas kebakaran dilaporkan berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Kebakaran tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dengan indikator pengukuran tingkat capaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020. LKIP Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi ini diharapkan sebagai pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik berdasarkan laporan dalam periode 1 tahun.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebagai berikut:

**A. Tugas**

Dinas kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

**B. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi mempunyai fungsi :

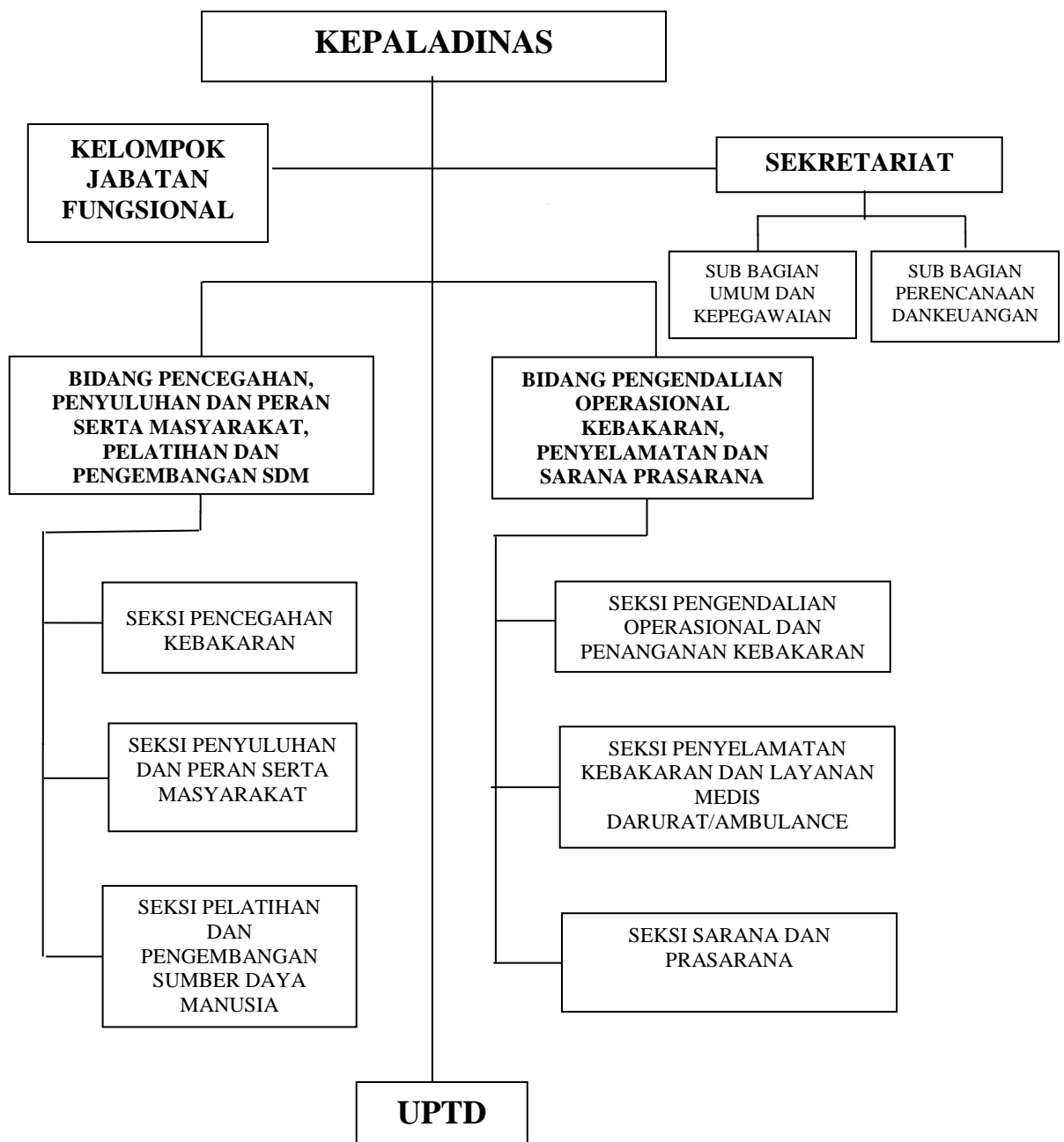
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang urusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang urusan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris, membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :
  - a. Seksi pencegahan kebakaran
  - b. Seksi Penyuluhan Kebakaran dan peran serta masyarakat
  - c. Seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
3. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Sarana dan Prasarana, membawahi :

- a. Seksi Pengendalian dan penanggulangan kebakaran
- b. Seksi Penyelamatan kebakaran dan layanan medis darurat/ambulance
- c. Seksi sarana dan prasarana

**BAGAN STRUKTUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA BUKITTINGGI TIPE C**





### 3. Isu Strategis

Isu-isu penting merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tugas Dinas Kebakaran, Dinamika perkembangan Kota Bukittinggi memunculkan sejumlah permasalahan yang perlu diatasi secara sistematis dan terencana. Isu-isu penting yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan tugas Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi, diantaranya :

- 1) Jumlah Kebakaran cenderung meningkat setiap tahunnya.
- 2) Jumlah petugas operasional yang memiliki kompetensi dan profesional belum memenuhi standar kualifikasi .
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan tentang penanggulangan kebakaran

### 4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2019 ini dibuat berdasarkan kepada :

1. Tap MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan  
Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## 5. SISTEMATIKA PENULISAN

LKIP Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2019 disusun melalui alur logika sistematis untuk mudah dipahami dan dicermati, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I            PENDAHULUAN :
- Pendahuluan berisikan Latar belakang, Tugas dan Fungsi Organisasi, Isu strategis, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan.
- BAB II           PERENCANAAN KINERJA :
- Perencanaan Strategis berisikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.
- BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA :
- Akuntabilitas Kinerja berisikan Indikator kinerja, Metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, Kendala Yang dihadapi dan akuntabilitas keuangan.
- BAB IV          PENUTUP :
- Menyajikan kesimpulan untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi melalui berbagai kegiatan tahunan.

Sistim AKIP merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistim Manajemen Kinerja yang dibangun diatas fondasi Sistim Manajemen Stratejik Sektor Publik. Sistim manajemen stratejik sektor publik merujuk pada sistim pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul Dinas Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

#### **1. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **a. VISI DAN MISI**

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu pandangan jauh ke depan bagi suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh Karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi "TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA

Dengan misi :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, maka Dinas Kebakaran mendukung pelaksanaan misi ke-5 yaitu “Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat” sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi.

Untuk mendukung visi dan misi Walikota dan wakil walikota maka Dinas Kebakaran menetapkan Visi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Bukittinggi Kota Siaga dan Aman Terhadap Bahaya Kebakaran**

**dan Bencana”** Melalui visi tersebut diharapkan Dinas Kebakaran akan menjadi unit kerja yang mampu mendukung Bukittinggi menjadi kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya.

Untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana tertuang dalam Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi. Misi tersebut adalah penjabaran dari Visi, yang merupakan acuan perencanaan strategis dalam pelaksanaan urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sub Kebakaran untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Misi Dinas Kebakaran adalah: **“Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemadam Kebakaran”**

#### **b. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan disusun dalam rangka pengendalian dan evaluasi misi yang telah disusun. Sementara sasaran adalah langkah untuk mewujudkan misi yang hendak dicapai melalui berbagai sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang akan dijalankan. Adapun tujuan yang ditetapkan di Dinas Kebakaran adalah:

##### **“Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran”**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Kebakaran serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga tercapai.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dijabarkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Upaya Pencegahan Kebakaran
2. Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Kebakaran

### **C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi telah menetapkan Indikator Kinerja, utama yang ingin dicapai Dinas Kebakaran di tahun 2016-2021 sesuai dengan rencana strategis Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebanyak 2 (dua) Indikator yang dirumuskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.1.C**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah**  
**Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016-2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	2%	2.5%	5%	6%	6.5%
		Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rate)	75%	80%	85%	90%	95%

#### **d. Kebijakan dan Program**

Strategis adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan atau merupakan pedoman pelaksana tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

- **Strategi**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas kebakaran merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Dinas kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

- 1) Meningkatkan Peran aktif Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- 2) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Gedung.
- 3) Meningkatkan kualitas penyuluhan pencegahan kebakaran
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran
- 5) Meningkatkan kualitas Pelatihan
- 6) Meningkatkan Kualitas Kendaraan Operasional.

- **Kebijakan**

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

- a. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- b. Peningkatan kualitas pengawasan Gedung dan sarana Publik;
- c. Peningkatan kualitas penyuluhan/Mitigasi Kebakaran;
- d. Terwujudnya Pembentukan BALAKAR
- e. Peningkatan kualitas layanan Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- f. Peningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah

Strategi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dalam tahun 2020 terdiri atas 6 (enam) kebijakan dengan 6 ( Enam ) Program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan untuk mencapai 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) tujuan strategis dapat dijabarkan dalam tabel berikut:



**Tabel II.4**  
**Tujuan, Sasaran , Kebijakan dan Program Kegiatan**  
**Dinas Kebakaran tahun 2020**

<b>Tujuan</b>	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran		
<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	Peningkatan kualitas pengawasan gedung Peningkatan kualitas Penyuluhan/ mitigasi kebakaran	Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bahaya Kebakaran</li> <li>2 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran</li> <li>3 Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran</li> </ol>
Meningkatkan kualitas penanggulangan kebakaran	Peningkatan kualitas layanan penanggulangan kebakaran	Peningkatan Penanggulangan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengadaan Saran dan Prasarana Penanggulanagan Kebakaran</li> <li>2 Penanggulangan Kebakaran</li> <li>3 Penyelamatan Korban Kebakaran dan Penyelamatan lainnya</li> <li>4 Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran</li> <li>5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran</li> <li>6 Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran</li> </ol>
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebakaran	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.</li> <li>3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> </ol>

Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
			4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.
			5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
			6 Penyediaan Alat tulis kantor
			7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
			8 Penyediaan komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor
			9 Penyediaan makan dan minum
			10 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi, dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi.
			11 administrasi pengadaan barang dan jasa.
		Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas
		Peningkatan sarana & Prasarana aparatur	1 Pengadaan Peralatan Kantor 2 Pengadaan Perlengkapan Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam periode satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kebakaran dengan Walikota Bukittinggi. Dalam penyusunannya perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan anggaran atau DPA. Berikut ini Perjanjian Kinerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2020:

**Tabel II.2.a**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	6,5%
2.	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rate)	95%

Dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Dinas Kebakaran dalam intern Dinas disusun Perjanjian Kinerja antara eselon III dengan eselon II dan eselon IV dengan eselon III berdasarkan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing pejabat terkait (terlampir).

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) Tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi selama Tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun anggaran 2020 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Rencana Kinerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat di lihatpada tabel dibawah ini :

**Tabel II.2.b**  
**MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	6,5%	Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	Rp 134.925.850,00
Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rate)	95%	Peningkatan Penanggulangan Kebakaran	Rp1.738.187.354,00

### 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja atau sering juga disebut Penetapan Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Rencana Kinerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2020 ditetapkan melalui Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi yang berisikan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui penandatanganan bersama antara Kepala Dinas Kebakaran dengan Walikota Bukittinggi. Adapun Penetapan Kinerja pada Dinas Kebakaran menyangkut urusan wajib yaitu : Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran tahun 2020 adalah sebagaimana table dibawah ini :

**Tabel. II.3**  
**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
		SASARAN	2020	
URUSAN : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	6,5%	<b>Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kebakaran</b> Pengawasan pelaksanaan kebijakan bahaya Kebakaran

				<p>Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran</p> <p>Bintek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran</p> <p>Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR)</p>
2	Meningkatnya kualitas penanggulangan kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon time rate)	95%	<p><b>Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran</b></p> <p>Pengadaan Saran dan Prasarana Penanggulangan Pelaksanaan</p> <p>Penanggulangan Kebakaran</p> <p>Penyelamatan Korban Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya</p> <p>Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran</p>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dalam metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

#### **1. INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. Indikator Masukan ( Input ) adalah menunjukan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran ( Output ) misalnya sumberdaya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran , indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan

berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator Keluaran ( Output ) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator Hasil ( Outcome ) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

## **2. METODELOGI PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) Tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung



persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

### 3. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 2 indikator kinerja dengan 1 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya ” **Sangat baik** ”.
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya ” **baik** ”.
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 % predikatnya ” **sedang** ”.
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 % predikatnya ” **kurang baik** ”.

### 4. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pada tahun 2020 Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi pada akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik. Capaian kinerja Dinas Kebakaran pada tahun 2020 dapat terlihat pada tabel berikut ini :



					Jumlah Kebakaran TH (n-1) - Jumlah Kebakaran Tahun N				
Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	=					X	100%		
					Jumlah Kebakaran Tahun n (n-1)				
Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran Th 2020	=		7,94%						

Persentase penurunan kejadian kebakaran pada tahun 2020 adalah sebesar 7,94 persen. Capaian dari sasaran meningkatnya upaya pencegahan kebakaran mempunyai prediket sangat baik, karena melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 6,5 persen.

sasaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran yang diukur melalui tingkat waktu tanggap (Respon time kebakaran), dihitung dengan formula sebagai berikut :

			Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap			
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	=			X	100%	
			Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK			

Jumlah kasus kebakaran di wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada tahun 2020 adalah sebanyak 58 kejadian dan seluruh kasus kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK dapat tertangani dalam tingkat waktu tanggap yaitu kurang dari 10 menit. Target sasaran Tingkat waktu tanggap (Respon time kebakaran) adalah 90% dengan realisasinya adalah sebesar 100% hal ini dapat tercapai dari rata-rata waktu yang dibutuhkan, sejak laporan diterima sampai petugas pemadam kebakaran tiba kelokasi kejadian kebakaran membutuhkan waktu kurang dari 10 menit.

					58 Kejadian				
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) TH 2020	=					X	100%		
					58 Kejadian				

Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) TH 2020	=	100%
---	---	------

Capaian sasaran meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran pada tahun 2020 memperoleh prediket sangat baik karena realisasinya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 95 persen.

Persentase capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 melebihi target yang telah ditentukan, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja bernilai sangat baik. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel III. 4. b**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Target Akhir Renstra	Ket
Meningkatnya Upaya Pencegahan kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	6,5%	7,94%	6,5%	
Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	Respon time kebakaran	95%	100%	95%	

Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel III. 4. c**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**3 (tiga) Tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019)**

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Ket
			Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2017	Th 2018	Th 2019	
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	2,5%	5%	6%	36,36%	18,18%	7,94%	
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	Respon time kebakaran	80%	85%	90%	100%	100%	100%	

## 5. KENDALA YANG DIHADAPI

Adapun kendala yang di hadapi oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dalam pencapaian kinerja yang dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Kurangnya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengerti dan kurang paham tentang pentingnya tabung racun api dalam pencegahan dini penganggulangan kebakaran.
- Belum terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) untuk meminimalisir kejadian kebakaran dan dapat teratasinya kebakaran secara dini.
- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran diperlukan tenaga oprasional yang memiliki keahlian dan keterampilan, untuk itu sangat diperlukan Diklat peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat masih sedikit dari jumlah tenaga operasional 36 orang yang memiliki sertifikat Diklat damkar I baru berjumlah 13 orang. Hal ini di sebabkan karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan Diklat.

- d. Masih kurang mendukungnya infrastuktur yang dimiliki dinas kebakaran seperti :
- Belum tersedianya hidran kota untuk penanggulangan kebakaran.
  - Belum terdapatnya Pos Pemadam kebakaran di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB)
  - Kondisi sarana dan peralatan yang memerlukan perbaikan dan penambahan

Sebagai Solusi dari permasalahan di atas maka perlu dilakukan :

- a. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat menyangkut pencegahan dini terhadap bahaya kebakaran.
- b. Mengusulkan terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)
- c. Melaksanakan Diklat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga operasional dan Melaksanakan Latihan gabungan sebagai bagian dari koordinasi dan komunikasi dengan Pemadam Kebakaran lainnya dalam hal Pencegahan dan pengendalian Kebakaran.
- d. Mengusulkan penambahan kembali pembangunan Sektor pemadam di Kecamatan Aur Birugo tigo Baleh (ABTB) sebagai antisipasi terhadap kemacetan, sehingga respon time kebakaran dapat dipertahankan.
- e. Melengkapi sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya penaggulangan kebakaran.

## **6. ANALISI ATAS EFESIENSI PEGGUNAAN SUMBER DAYA**

Selama Tahun 2020 Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kebakaran untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dengan di bangunnya sektor pemadam yang baru di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) idealnya dilakukan penambahan personil pemadam kebakaran, namun Dinas Kebakaran mengoptimalkan sebaik mungkin personil pemadam kebakaran yang telah ada.
- b. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.
- c. Melakukan cascading kinerja dalam menyusun program dan kegiatan pada Tahun 2020, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2020.


## 7. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi adalah sebesar **Rp6.319.212.733,-** dengan realisasi sebesar **Rp5.757.209.888,-** atau **91,11 %**, dengan rincian dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel III.7.a**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Pada Dinas Kebakaran Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>BELANJA</b>			
Belanja Tidak Langsung	3.550.716.819,00	3.346.463.229,00	94,25
Belanja Langsung	2.768.495.914,00	2.410.746.659,00	87,08
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>6.319.212.733,00</b>	<b>5.757.209.888,00</b>	<b>91,11</b>

Berdasarkan Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kebakaran tahun 2020 secara lebih rinci anggaran dan realisasi dapat dilihat dari table berikut ini:

<div align="center">  <b>Tabel III.7.b</b>  <b>Anggaran dan Realisasi Keuangan</b>  <b>Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi</b>  <b>Tahun 2020</b> </div>					
NO	Sumber Dana	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>6.319.212.733,00</b>	<b>5.757.209.888,00</b>	<b>91,11</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>3.550.716.819,00</b>	<b>3.346.463.229,00</b>	<b>94,25</b>
<b>I</b>	<b>Belanja Pegawai</b>		<b>3.550.716.819,00</b>	<b>3.346.463.229,00</b>	<b>94,25</b>
1	APBD	Belanja Gaji dan tunjangan	2.097.191.819,00	2.026.846.885,00	96,65
2	APBD	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.453.525.000,00	1.319.616.344,00	90,79
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>2.768.495.914,00</b>	<b>2.410.746.659,00</b>	<b>87,08</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>777.566.410,00</b>	<b>682.061.430,00</b>	<b>87,72</b>
1	APBD	Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000,00	1.761.000,00	97,83
2	APBD	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.500.000,00	37.179.190,00	81,71
3	APBD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	537.571.000,00	478.695.335,00	89,05
4	APBD	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00	9.999.850,00	100,00
5	APBD	Penyediaan alat tulis kantor	23.778.500,00	23.778.500,00	100,00
6	APBD	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.132.000,00	10.088.400,00	90,63



NO	Sumber Dana	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
7	APBD	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
8	APBD	Penyediaan makanan dan minuman	12.500.000,00	12.423.675,00	99,39
9	APBD	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	119.158.700,00	110.304.140,00	92,57
10	APBD	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
12	APBD	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	6.126.210,00	3.075.000,00	50,19
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		26.664.000,00	24.914.000,00	93,44
13	APBD	Pengadaan peralatan kantor	20.400.000,00	18.650.000,00	91,42
14	APBD	Pengadaan perlengkapan kantor	4.530.000,00	4.530.000,00	100,00
15	APBD	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.734.000,00	1.734.000,00	100,00
III	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		37.050.000,00	37.050.000,00	100,00
16	APBD	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	37.050.000,00	37.050.000,00	100,00
III	<b>Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		54.102.300,00	52.468.400,00	96,98
17	APBD	Peringatan HUT Damkar	54.102.300,00	52.468.400,00	96,98
IV	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>		134.925.850,00	107.080.112,00	79,36
18	APBD	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	7.366.850,00	7.356.750,00	99,86
19	APBD	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	79.003.000,00	51.167.362,00	64,77
20	APBD	Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
21	APBD	Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	636.000,00	636.000,00	100,00
	APBD	Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR)	25.920.000,00	25.920.000,00	
IV	<b>Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran</b>		1.738.187.354,00	1.507.172.717,00	86,71
22	APBD	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	254.000.000,00	250.817.035,00	98,75
23	APBD	Penanggulangan Kebakaran	1.358.181.354,00	1.198.101.132,00	88,21
24	APBD	Penyelamatan Korban Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya	67.506.000,00	12.153.200,00	18,00
25	APBD	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	58.500.000,00	46.101.350,00	78,81
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>		2.768.495.914,00	2.410.746.659,00	87,08
	<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>6.319.212.733,00</b>	<b>5.757.209.888,00</b>	<b>91,11</b>

Untuk mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran dialokasikan anggaran pada Dinas Kebakaran sebesar Rp 859.382.710,- dengan realisasi sebesar Rp 796.493.830,- atau sebesar 88,96. Sedangkan untuk program penunjang urusan yaitu program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.873.113.204,- dengan realisasi Rp 1.614.252.829,- (86,18 %). Untuk pencapaian kinerja terkait dengan realisasi program kegiatan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sub Kebakaran diuraikan sebagai berikut:

## **NON URUSAN**

### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang ada pada setiap SKPD atau merupakan program rutin yang mendukung penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub kebakaran pada Dinas Kebakaran. Pada tahun 2019, program pelayanan administrasi perkantoran mengalokasikan dana sebesar Rp1.644.218.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.603.298.161,- dengan tingkat realisasi sebesar 97.51 % dan realisasi fisik sebesar 100%, program ini terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Penyediaan jasa surat menyurat**

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Materai 6.000, materai 3.000 dan cek bermaterai yang terbeli dengan target materai 6.000 sebanyak 210 buah, materai 3.000 sebanyak 104 buah dan buku cek bermaterai 1 buah maka dialokasikan dana sebesar Rp 1.800.000,- dan realisasi

sebesar Rp1.761.000,- dengan tingkat realisasi sebesar 87.33% dan realisasi fisik sebesar 100%

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik  
Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah rekening yang dibayarkan dengan target 2 rekening listrik, 1 rekening telepon dan 8 rekening air dialokasikan dana sebesar Rp45.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 37.179.190,- dengan tingkat realisasi sebesar 81,71 % dan realisasi fisik kegiatan ini 100%.
3. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  
Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah ketersediaan kendaraan yang di perbaiki dengan target kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit dan mobil kebakaran sebanyak 6 unit maka di alokasikan dana sebesar Rp537.571.000,- dan realisasi sebesar Rp463.451.679,- dengan tingkat realisasi sebesar 86,21% dan realisasi fisik kegiatan ini adalah 100%
4. Penyedia jasa kebersihan kantor  
Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah alat dan bahan pembersih yang tersedia dan pembayaran retribusi sampah dengan target 35 bahan dan alat pembersih dan 1 retribusi sampah maka dialokasikan dana sebesar Rp10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 9.999.850,- dengan tingkat realisasi 99,57% dan realisasi fisik 100%.
5. Penyedia jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor  
Indikator kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki dengan target sebanyak 9 macam ( Lap top,printer, mesin tik, infocust, alat komunikasi yang diperbaiki) maka dialokasikan dana sebanyak Rp 5.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.000.000,- dengan tingkat realisasi 100% dan raelisasi fisik 100%.

6. Penyedia alat tulis kantor

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah alat tulis kantor yang terbeli dengan target sebanyak 47 jenis maka dialokasikan dana sebesar Rp23.778.500,- dengan realisasi Rp23.778.500,- dengan tingkat realisasi 90,63% dan realisasi fisik kegiatan ini adalah 100%.

7. Penyedia barang cetak dan penggandaan

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dengan target 9 jenis maka dialokasikan dana sebesar Rp11.132.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.088.400,- dengan tingkat realisasi 90.63% dan realisasi fisik 100%

8. Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia dengan target 16 macam maka dialokasikan dana sebesar Rp 5.000.000,- dan realisasi sebesar Rp5.000.000,- dengan tingkat realisasi 100% dan realisasi fisik 100%.

9. Penyediaan makan dan minum

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah makan dan minum yang tersedia dengan target nasi bungkus sebanyak 440 bungkus dan snack sebanyak 500 kotak maka dialokasikan dana sebesar Rp 12.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 12.423.675,- dengan tingkat realisasi 99.39% dan realisasi fisik kegiatan ini adalah 100%

10. Rapat-rapat koordinasi konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dengan target 12 bulan maka dialokasikan dana sebesar Rp119.158.700,- dan realisasi

Rp110.304.140,- dengan tingkat realisasi 92.57% dan realisasi fisik kegiatan ini adalah 100%

11. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah honorarium tim barang dan jasa dengan target sebanyak 4 orang maka dialokasikan anggaran sebanyak Rp6.126.210,- dan realisasi Rp 3.075.000,- dengan tingkat realisasi 50,19% realisasi keuangannya sangat rendah disebabkan dibatalkannya kegiatan pengadaan mobil pemadam kebakaran dan realisasi fisik 100%.

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan program yang berisikan beberapa kegiatan yang terkait dengan penyediaan kelengkapan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas SKPD. Program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp 26.664.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp 24.914.000,- dan tingkat realisasi sebesar 93,44% seluruh sarana dan sarana aparatur yang direncanakan dapat tersedia. Sehingga realisasi fisik kegiatan ini 100%. Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan Kantor

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan kantor yang diadakan sebanyak 2 jenis dengan anggaran sebesar Rp 20.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp18.650.000 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 91,42 Pengadaan Peralatan Kantor ini terealisasi seluruhnya sehingga realisasi fisik kegiatan ini 100%.

2. Pengadaan Perlengkapan Kantor

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan sebanyak 3 jenis dengan anggaran

sebesar Rp 4.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp4.530.000 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 100% Pengadaan Peralatan Kantor ini terealisasi seluruhnya sehingga realisasi fisik kegiatan ini 100%.

3. Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PBB yang dibayar sebanyak 1 PBB dengan anggaran sebesar Rp1.734.000,- dan realisasi sebesar Rp1.734.000,- dengan tingkat realisasi sebesar 100%. kegiatan ini terlaksana seluruhnya sehingga realisasi fisik kegiatan ini 100%

**C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan program yang berisikan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas yang terkait dengan penyediaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang sangat mendukung pelaksanaan tugas SKPD. indikator dari kegiatan ini adalah jumlah Pakain Dinas beserta kelengkapan sebanyak 57 stel. Kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp37.050.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp37.050.000,- dan tingkat realisasi sebesar 100% realisasi fisik kegiatan ini 100%

**D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan program yang berisikan kegiatan Peringatan HUT DAMKAR dengan indikator kegiatan jumlah kegiatan upacara, simulasi dan atraksi. Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp54.102.300,- dengan realisasi dana sebesar R52.468.400,- dan tingkat realisasi sebesar 96,98% kegiatan ini terlaksana seluruhnya sehingga realisasi fisik kegiatan ini 100%

## **PROGRAM URUSAN**

### **A. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kebakaran**

Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran ini dilaksanakan guna terwujudnya Kesiapsiagaan dan pencegahan terjadinya kebakaran. Program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp 134.925.850,- dengan realisasi sebesar Rp107.080.112,- dengan tingkat realisasi 79,36%. Capaian kinerja pelaksanaan program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran ini ditunjang oleh 5 (lima) kegiatan, sebagai berikut:

#### **1) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran**

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Inspeksi tersedianya sarana penanggulangan kebakaran di gedung pemerintah daerah, Gedung BUMD Sekolah - sekolah dan Pasar. Dengan target 40 kali inspeksi dialokasikan dana sebesar Rp79.003.000,- dengan realisasi sebesar Rp51.167.362,- dengan tingkat realisasi sebesar 64,77%. Realisasi kegiatan ini rendah diakibatkan karena perubahan tujuan perjalanan Dinas yang awalnya direncanakan ke Surabaya di ganti ke Medan karena Surabaya merupakan daerah Zona Hitam Covid 19. Seluruh target yang direncanakan dapat terealisasi sehingga secara fisik realisasi kegiatan ini adalah 100%.

#### **2) Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran**

Indikator Kegiatan ini adalah jumlah peserta penyuluhan dengan target 96 (Sembilan puluh enam) orang. kegiatan ini mengalami reconfusing dan rasionalisasi untuk penanganan Covid 19 maka di alokasikan dana sebesar Rp7.366.850,-

dengan realisasi sebesar Rp.7.356.750,- dan tingkat realisasi 99,86% dengan realisasi fisik 100%.

### **3) Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran**

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah peserta bimtek sebanyak 55 orang. Dana kegiatan ini pada tahun 2020 di rasionalisasi untuk penanganan covid 19 sehingga anggaran kegiatan ini menjadi Rp636.000,- dengan realisasi Rp636.000,- dengan tingkat realisasi 100%. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 100% sesuai dengan anggaran yang tersedia.

### **4) Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran**

Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Informasi kebakaran dengan target 6 macam dialokasikan dana sebesar Rp22.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 22000000,- dengan tingkat realisasi 100% realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 100%.kegiatan ini juga mengalami refocusing

### **5) Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR)**

Indikator dari kegiatan ini adalah terbentuknya Barisan Relawan Kenakaran dengan target 72 orang, anggaran kegiatan ini sebesar Rp 141.711.840 namun pada tahun berjalan kegiatan ini di refocusing dan di rasionalisasikan sehingga Barakar belum dapat terbentuk.

## **B. Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran**

Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran ini dilaksanakan guna terwujudnya kesiapsiagaan aparatur Dinas Kebakaran dalam mengatasi kebakaran dan pencegahan terjadinya kebakaran. Program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp1.738.187.354,- dengan realisasi sebesar



Rp1.507.172.717,- dengan tingkat realisasi 86,71%. Capaian kinerja pelaksanaan program peningkatan penanggulangan kebakaran ini ditunjang oleh 4 (empat) kegiatan, sebagai berikut:

**1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran**

Indikator Kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dengan target 6 (enam) jenis sarana dan prasarana penanggulangan. Kegiatan ini mengalami refofusing sehingga anggaran kegiatan ini menjadi Rp254.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp250.817.035,- dan tingkat realisasi 98,21% dengan realisasi fisik 100%.

**2) Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran**

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah Operasi penanggulangan kebakaran dengan target 80 kejadian, maka dialokasikan dana sebesar Rp1.358.181.354,- dengan realisasi sebesar Rp1.198.101.132,- dengan tingkat realisasi sebesar 88,21% pada tahun 2020 terjadi kebakaran sebanyak 97 kejadian yang terdiri dari kebakaran dalam kota sebanyak 58 kejadian dan perbantuan penanggulangan kejadian kebakaran di luar kota sebanyak 39 kejadian. Penanggulangan kebakaran dapat diatasi secara keseluruhan sehingga realisasi fisik kegiatan ini adalah 100%.

**3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran**

Indikator Kegiatan ini adalah jumlah sarana prasarana yang di pelihara sebanyak 6 jenis. Kegiatan ini dialokasikan anggran sebesar Rp 58.500.000 dengan realisasi sebesar Rp46.101.350,- dan tingkat realisasi 78,81% dengan realisasi fisik 100%.

Berikut ini dapat dilihat Penyerapan anggaran pada Dinas Kebakaran menyangkut pada sasaran Dinas Kebakaran Koata Bukittinggi :

Tabel III. B.3  
Penyerapan Anggaran pada setiap sasaran  
Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi  
Tahun 2020

No	Sasaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatkan Pencegahan Kebakaran pada Masyarakat	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Kebakaran	79.003.000,-	51.167.362,-	64,77
		Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	7.366.850,-	7.356.750	99.86
		Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	636.000,-	636.000,-	100
		Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	22.000.000,-	22.000.000,-	100
2.	Terwujudnya Penanggulang an Kebakaran yang handal, dini dan Komprehensif	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	254.000.000,-	250.817.035,-	98,75
		Penanggulangan Kebakaran	1.358.181.354,-	1.198.101.132,-	88,21

No	Sasaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Penyelamatan Korban Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya	67.506.000	12.153.200	18,00
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	58.500.000	46.101.350	78,81

Dapat disimpulkan Secara umum efektifitas anggaran di tahun 2020 terhadap capaian Sasaran Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi, bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Dinas Kebakaran sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi berdasarkan suatu system akuntabilitas serta sebagai bahan pengambil keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang untuk mencapai efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran dari misi yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan cukup Berhasil. Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran yang merupakan Capaian Indikator Kinerja Utama atau kinerja sasaryang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Persentase Penurunan Kejadian kebakaran dengan capaian kinerja 122% dengan kategori sangat baik.
2. Tingkat waktu tanggap layanan (Respon Time) Kebakaran dengan capaian kinerja 105% dengan kategori sangat baik.

Sedangkan Kinerja keuangan Dinas Kebakaran Bukittinggi pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 6.319.212.733,- dengan realisasi sebesar Rp5.757.209.88,00 atau 91.11% cukup efektif dan efesien.

## 2. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka pemecahan masalah yang terjadi pada tahun 2020 dapat diambil strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan gedung dan sarana publik dengan terlebih dahulu mengikut sertakan tenaga pengawas untuk mengikuti Diklat untuk pengawasan gedung ini, sehingga sehingga dari pengawasan sendiri memiliki wawasan yang luas terhadap kelayakan suatu gedung dalam perlindungan kebakaran
- b. Dibentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) sebagai pendukung dalam penanggulangan kebakaran secara dini.
- c. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
- d. Meningkatkan kualitas penyuluhan pencegahan kebakaran.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2020, dengan harapan pada tahun yang akan datang pelaksanaan program dan kegiatan lebih dapat terlaksana dengan baik demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bukittinggi, januari 2021

